



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKjIP

**KECAMATAN PETANAHAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

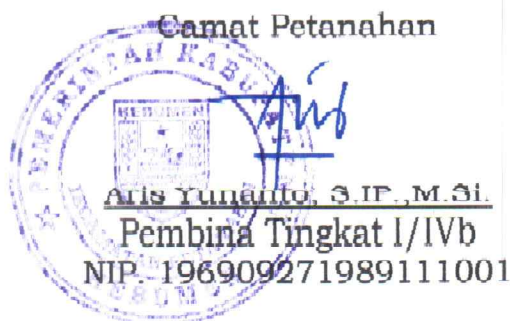
LKjIP Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Petanahan ini juga telah melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.

Pada akhirnya, semoga dokumen ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 28 Januari 2026

Camat Petanahan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis.....	4
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	13
1.4. Landasan Hukum	14
1.5. Sistematika.....	15
1.6. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE).....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Perencanaan Strategis	19
1. Rencana Strategis (Renstra)	19
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25
2.2. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	31
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	36
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 ...	39
3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten dan Kecamatan Lain	41
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	39
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	45
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	49
3.2. Realisasi Anggaran.....	51

BAB IV PENUTUP.....	52
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	52
4.2. Permasalahan/Kendala	53
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	53
LAMPIRAN	56
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Petanahan Tahun 2025 2

Tabel 1.2. Komposisi SDM Kecamatan Petanahan Tahun 2025
Menurut Jabatan 3

Tabel 1.3. Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (Lhe) Akip Internal
Kecamatan Petanahan Tahun 2025 16

Tabel 2.1. Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026 21

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petanahan 21

Tabel 2.3. Rumusan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Petanahan 23

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Petanahan..... 25

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Camat Petanahan Kabupaten Kebumen..... 26

Tabel 2.6. Program dan Kegiatan Kecamatan Petanahan 27

Tabel 3.1. Rentang dan Kategori Capaian Kinerja 30

Tabel 3.2. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 32

Tabel 3.3. IKM Pertriwulan Tahun 2025 Berdasarkan Unsur Pelayanan..... 32

Tabel 3.4. Indeks Desa Membangun Kecamatan Petanahan Tahun 2025 34

Tabel 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025..... 35

Tabel 3.6. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 37

Tabel 3.7. Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 39

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten
dan Kecamatan Lain 41

Tabel 3.9. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi atas
Indeks Kinerja Utama Tahun 2025 44

Tabel 3.10. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tujuan dan Sasaran 46

Tabel 3.11. Bezeting ASN Kecamatan Petanahan Per 1 Januari 2026 47

Tabel 3.12. Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan..... 49

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Kecamatan Petanahan Tahun 2025 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Petanahan..... 5

Gambar 3.1. Foto Pelaksanaan Penyampaian Hasil *Coaching Clinic*
Perjanjian Kinerja 2026 dan Reviu LKJIP 2025 30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 37

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Standar Kabupaten
dan Kecamatan Lain 42

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Petanahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Petanahan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Petanahan.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas kepada Bupati Kebumen dan masyarakat, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis kecamatan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran di lingkungan Kecamatan Petanahan.

Dengan disusunnya LKjIP Kecamatan Petanahan Tahun 2025, diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Petanahan merupakan perangkat daerah Kabupaten Kebumen yang menjalankan kewenangan pemerintahan umum, pelayanan administrasi pemerintahan, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Petanahan. Secara geografis Kecamatan Petanahan terletak antara 7,4452° Lintang Selatan dan 109.353

Bujur Timur dengan Luas Wilayah 4.484 Hektar atau 44,84 Km² yang berada di Ketinggian rata-rata 20 M dari permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Petanahan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Puring
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Klirong
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Adimulyo
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Jumlah desa di Kecamatan Petanahan sebanyak 21 Desa dengan jumlah penduduk total tahun 2023 sebanyak 63.433 jiwa. Gambaran Penduduk di Kecamatan Petanahan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Petanahan Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Karangrejo	2.505	2.502	5.007
2	Karanggadung	1.371	1.430	2.801
3	Tegalretno	1.276	1.261	2.537
4	Ampelsari	974	986	1.960
5	Munggu	1.730	1.690	3.420
6	Kewangun	1.710	1.656	3.366
7	Karangduwur	2.541	2.544	5.085
8	Petanahan	2.076	2.075	4.151
9	Kebonsari	735	745	1.480
10	Grogolpenatus	1.574	1.551	3.125
11	Grogolbeningsari	2.081	1.968	4.049
12	Jogomertan	2.073	1.990	4.063
13	Tanjungsari	2.288	2.130	4.418
14	Sidomulyo	1.203	1.115	2.318
15	Grujugan	896	883	1.779
16	Kritik	1.438	1.388	2.826
17	Nampudadi	1.222	1.137	2.359
18	Tresnorejo	627	642	1.269
19	Podourip	762	744	1.506
20	Jatimulyo	1.410	1.444	2.854
21	Banjarwinangun	1.579	1.481	3.060
Jumlah		32.071	31.362	63.433

(Sumber: BPS Kabupaten Kebumen Kecamatan Petanahan dalam Angka Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 Kecamatan Petanahan memiliki penduduk sebanyak 63.433 jiwa terdiri dari laki laki 32.071 jiwa (50,56%) dan perempuan sebanyak 31.362 jiwa (49,44%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Petanahan tahun 2025 terdiri dari 60 PAUD dengan jumlah siswa 1.766 jiwa, 35 sekolah SD/Sederajat dengan jumlah 5.046 siswa, 11 sekolah SMP Sederajat, dengan jumlah 3.395 siswa, 8 sekolah SMA/Sederajat dengan jumlah 2.290 siswa.

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih belum mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan idealnya. Namun, sampai dengan Januari 2026 baru sebanyak 18 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi SDM Kecamatan Petanahan Tahun 2025
Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	0
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	0
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1
9.	Perencana Ahli Pertama	1
10	Verifikator	0
11	Bendahara	1
12	Pengadministrasian Umum	5
13	Arsiparis Terampil	1
14	Penggerak Swadaya Masyarakat	1
15	Administrasi Perkantoran	1
16	Pengelola Umum Operasional	1
	Jumlah	18

Sumber Data: Kecamatan Petanahan, Januari 2026.

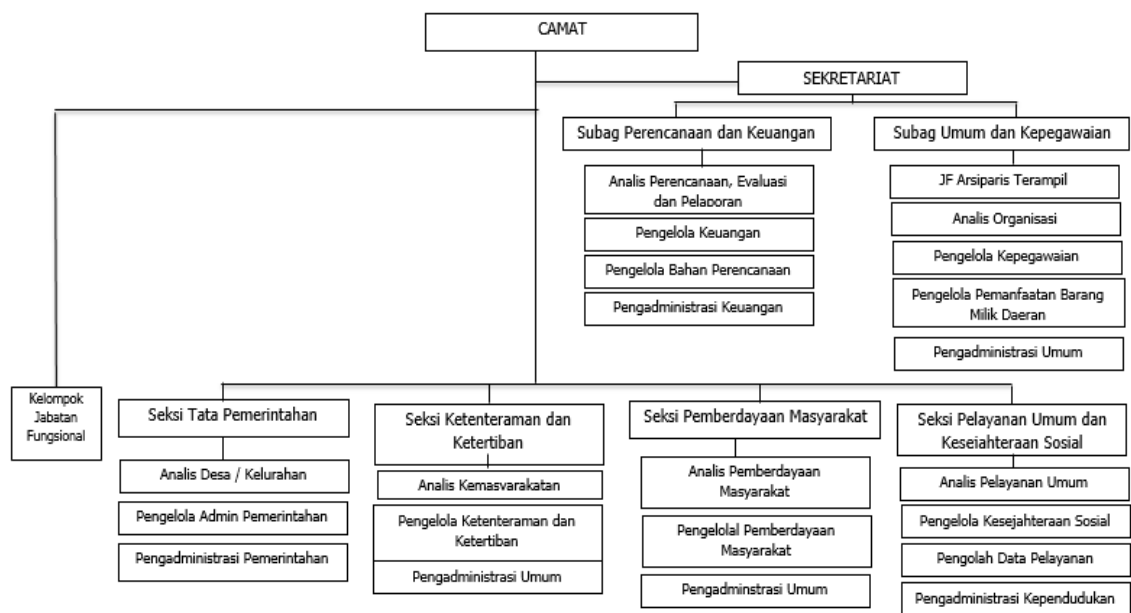
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa jabatan struktural masih kosong, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Dari total 18 (delapan belas) pegawai ASN, terdapat 3 (tiga) orang yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini kekosongan jabatan diisi oleh pelaksana tugas sehingga fungsi pelayanan tetap berjalan.

1.2. Fungsi Strategis

Kecamatan Petanahan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Petanahan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Petanahan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah dengan uraian dari masing masing jabatan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi di Kecamatan Petanahan

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sesuai penjelasan dalam sub bab sebelumnya.
2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat, dengan tugas sebagai berikut;
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan

anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;

- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Petanahan masih menghadapi beberapa permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2025. Permasalahan tersebut bersumber dari beberapa aspek. Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

Faktor lainnya yang turut memengaruhi kinerja kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pelayanan, seperti belum adanya AC pada ruang tunggu dan minimnya kursi tunggu. Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan. Ruang penyimpanan bidang pelayanan juga belum representatif, karena belum tersedianya ruang arsip khusus untuk administrasi kependudukan yang aman dan terstandar.

2. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan masih terganggu akibat kendala jaringan internet. Pada tahun 2025 hal tersebut beberapa kali terjadi sehingga kebutuhan publik tidak bisa langsung terlayani. Gangguan tersebut berdampak pada terhambatnya proses perekaman, verifikasi, dan pencetakan dokumen kependudukan, sehingga waktu pelayanan menjadi lebih lama dari standar yang telah ditetapkan

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penentuan strategi, program, dan target kinerja Kecamatan Petanahan pada tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Petanahan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan

9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.5. Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, fungsi strategis, permasalahan utama yang dihadapi, landasan hukum, dan sistematika.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini memuat perencanaan strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

BAB IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan/ kendala serta strategi penyelesaian permasalahan

LAMPIRAN : Pada lampiran memuat perjanjian kinerja Camat Petanahan Tahun 2025

TABEL 1.3
MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP
INTERNAL KECAMATAN PETANAHAN TAHUN 2025

No.	Temuan	Rekomendasi	Data Dukung Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Casecading yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola crosscutting kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Menyusun Pohon Kinerja dengan menggambarkan bagaimana pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Caseading Kinerja Kecamatan Petanahan	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1avICK33Nkgmj3fPI6H6nUuL8xmWdyCu0
2.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kurang dapat mengukur kinerja organisasi	Merumuskan Indikator Kinerja Utama Kecamatan yang relevan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan mendukung pencapaian strategis daerah;	Telah dirumuskan indicator kinerja: Persentase Desa dengan indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri, dan sudah masuk dalam perjanjian Camat tahun 2025.	https://drive.google.com/drive/folders/1CfiZR-hsbUAnXkgBco90iW4ebzKIBPd?usp=drive_link
3.	SOP Pengukuran Data Kinerja telah disusun namun masih belum secara spesifik menggambarkan mekanisme dan prosedur dalam rangka pengumpulan data kinerja utama (IKM) secara spesifik agar dapat menyajikan data yang valid dan akuntabel;	Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga didapatkan data yang valid dan akuntabel;	Telah diuraikan formulasi pengukuran kinerja utama yaitu IKM dalam LKjIP dan SOP Pengukuran Kinerja.	https://drive.google.com/drive/folders/1wlCtg_CKuO7PG7aRbkVjps7orl98nSVr?usp=drive_link
4.	Hasil penilaian IKM belum dilengkapi dengan laporan SKM secara periodik.	Agar menyusun Laporan IKM secara periodik (triwulanan) dan melaporkan hasil pelaksanaan SKM kepada Bupati selaku Pembina Pelayanan Publik melalui Sekretaris Daerah	Telah menyusun laporan SKM TW I, II, III, dan IV	https://drive.google.com/drive/folders/1Ab8byP8oDZc407GH6ghhCT8XgEarevz8?usp=drive_link

No.	Temuan	Rekomendasi	Data Dukung Tindak Lanjut	Keterangan
5.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian kinerja masih belum memadai. Kecamatan Petanahan telah melakukan pengukuran kinerja triwulanan namun belum menginformasikan progres realisasi dan capaian kinerja secara triwulanan serta belum melampirkan link bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja.	Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala (triwulanan), yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen, serta melampirkan bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan solusi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai kinerja agar tetap <i>on the track</i> ;	Telah dilaksanakan pengukuran kinerja secara triwulanan yang membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dan telah melampirkan bukti dukung hasil kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/18WFhDrDH7y8XrnyYXobeK7wg7W3WcAKG?usp=drive_link
6.	LKjIP terlambat dipublikasikan pada aplikasi (https://semarak.kebumen.kab.go.id/), dan belum mempublikasikan pada website Kecamatan Petanahan;	Mempublikasikan Laporan Kinerja (LKjIP) pada aplikasi semarak (https://semarak.kebumenkab.go.id/) tepat waktu maksimal 31 Januari tahun berikutnya dan mempublikasikan secara tepat waktu pada aplikasi esr Menpan serta website Kecamatan Petanahan;	Telah di publikasikan LKjIP 2025 pada semarak dan esr.menpan, serta website kecamatan dengan tepat waktu.	https://drive.google.com/drive/folders/1OJ40P75pvsXaiijhblnArWHKR0CU1T9G?usp=drive_link
7.	Informasi realisasi kinerja pada LKJIP Tahun 2024 Kecamatan Petanahan hanya membandingkan dengan capaian tahun 2023, belum ada perbandingan dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir);	Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	Telah dilakukan perbaikan pada Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	https://drive.google.com/drive/folders/1q0XtDuXgXD_53wdB57_CevTYV6KMKmJW?usp=drive_link

No.	Temuan	Rekomendasi	Data Dukung Tindak Lanjut	Keterangan
8.	Laporan kinerja (LKJIP Tahun 2024) telah menginformasikan keberhasilan atas pencapaian kinerja namun belum menganalisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.	Memperbaiki Laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2024 BAB III dengan menyajikan analisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.	Telah dilakukan perbaikan pada Laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2024 BAB III dengan menyajikan analisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.	https://drive.google.com/drive/folders/1S6MoJHOhrQjiHzNLqEJ0jI_czTyNUBY?usp=drive_link
9.	Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 ditindaklanjuti	Menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKJIP) Kecamatan Petanahan Tahun 2025 pada BAB 1 (Pendahuluan).	Sudah disusun Laporan Tindak Lanjut atas hasil evaluasi SAKIP 2025 dan telah dituangkan dalam LKjIP Kecamatan Petanahan tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1F-EBIkP_NBAxJ84u47cAgUZWpWkf8-JX?usp=drive_link

Sumber : Dokumen Tindak Lanjut LHE Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan tabel 1.3 tentang matriks tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2025, Kecamatan Petanahan telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP. Seluruh tindak lanjut tersebut di atas menjadi komitmen Kecamatan Petanahan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Petanahan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yaitu periode 2021-2026 yang menyajikan data potensi, peluang, serta hambatan atau kendala yang di hadapi.

1. Rencana Strategis

Renstra disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Visi tersebut yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.
3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari.

Untuk pencapaian Visi, perlu dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Petanahan adalah sebagai berikut:

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Petanahan lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa menuntut peran Kecamatan Petanahan harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat terwujudnya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Petanahan adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten;
dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Tabel 2.1.

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Petanahan sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petanahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00
1.1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42
1.2		Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	75%	80%	85%	90%	100%	100%

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 2.2, dijelaskan bahwa tujuan Kecamatan Petanahan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai indeks pada baris 1 (satu) menunjukkan target Kabupaten Kebumen sebesar 82,50 pada

awal tahun 2021 hingga target akhir tahun 2026 sebesar 86,00. Selanjutnya, sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Petanahan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target IKM mengalami peningkatan bertahap dari 85,00 pada tahun 2021 hingga 92,42 pada tahun 2026, yang menunjukkan bahwa akan ada upaya perbaikan pelayanan publik, kemudahan akses layanan, serta responsivitas aparaturnya berjalan secara positif dan memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Sasaran meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri diukur melalui indikator Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri. Indikator ini menggambarkan keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan desa, khususnya dalam mendorong peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) kategori Desa Maju dan Mandiri.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Petanahan. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Berikut adalah rumusan IKU Kecamatan Petanahan.

Tabel 2.3

Rumusan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Petanahan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
		SASARAN PROGRAM																		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik																			
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh kecamatan Petanahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>8,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>6,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>5,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>5,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	8,31 – 100,00	A	Sangat Baik	6,61 – 88,30	B	Baik	5,00 – 76,60	C	Kurang Baik	5,00 – 64,99	D	Tidak Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
8,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
6,61 – 88,30	B	Baik																		
5,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
5,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
		SASARAN PROGRAM			
				Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Petanahan	Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
1.2		Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di Kecamatan Petanahan dengan Indeks Desa Kategori Maju dan Mandiri/Jumlah desa di Kecamatan Petanahan)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Penanggung Jawab: Camat Petanahan	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Petanahan, yang ditunjukkan oleh proporsi desa yang telah mencapai status Desa Maju dan Desa Mandiri berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indikator ini mencerminkan kemandirian desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta efektivitas pembinaan dan fasilitasi pemerintah kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Petanahan

Berdasarkan tabel 2.3, dapat dijelaskan bahwa IKU Kecamatan Petanahan terdiri Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan, dan Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dengan formulasi perhitungan dan definisi operasional disajikan dalam tabel di atas.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Petanahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
					2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
1.1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40
1.2		Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	100%

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, target tahun 2025 di Kecamatan Petanahan adalah 91,40 untuk Indikator IKM, dan 100% untuk indikator Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri. Target ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam memberikan pelayanan yang semakin baik, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selanjutnya target tersebut dijadikan sebagai dasar penilaian dalam LKjIP ini.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat penugasan dari Camat Petanahan kepada para pejabat di lingkungan kecamatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Tahun 2025. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Petanahan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seluruh pejabat pelaksana bersepakat untuk melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, Perjanjian Kinerja ini juga menjadi pedoman dalam penyediaan data kinerja, pelaporan, serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Petanahan Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 sesuai dengan anggaran perubahan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
 Camat Petanahan Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
	Sasaran:								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40	91,40				91,40
3	Meningkatnya indeks Desa Membangun	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	100	100				100

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Petanahan

Berdasarkan tabel 2.5, sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui IKM kecamatan dengan target tetap sebesar 91,40, baik sebelum maupun setelah perubahan, yang direncanakan tercapai secara konsisten pada setiap triwulan yang menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun. Sementara itu, sasaran meningkatnya persentase Desa Membangun diukur melalui persentase desa membangun kategori maju dan mandiri dengan target akhir 100 persen, yang direncanakan tercapai pada akhir tahun setelah melalui proses pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan desa secara bertahap pada setiap triwulan.

Untuk melaksanakan target kinerja di atas, Kecamatan Petanahan didukung anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.6

Program dan Kegiatan Kecamatan Petanahan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp2.188.039.735,00	Rp2.396.887.200,00
1.1	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Rp10.000.000,00	Rp9.228.300,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	2.002.178.735,00	Rp2.218.247.400,00
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	48.461.000,00	Rp42.394.900,00
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	4	Rp35.750.000,00	Rp35.750.000,00
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	Rp32.400.000,00	Rp32.016.600,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Rp59.250.000,00	Rp59.250.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100%	Rp1.197.093.000,00	Rp42.314.500,00
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Rp1.197.093.000,00	Rp42.314.500,00

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Rp21.002.000,00	Rp19.002.800,00
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2	Rp21.002.000,00	Rp19.002.800,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Rp141.267.000,00	Rp123.168.200,00
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp.141.267.000,00	Rp123.168.200,00
Total Anggaran				Rp3.547.401.735,00	Rp 2.581.372.700,00

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Petanahan, 2025

Berdasarkan tabel 2.6, total anggaran perubahan pada Kecamatan Petanahan tahun 2025 sebesar Rp2.581.372.700,00 dari sebelumnya pagu murni sebesar Rp3.547.401.735,00 yang terdiri atas 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Petanahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Petanahan senantiasa berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kinerja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 tergambar melalui tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Upaya pencapaian kinerja tersebut juga selaras dengan Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan selama Tahun 2025. Selain itu diuraikan juga keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Kecamatan Petanahan diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Petanahan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut

dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui deviasi. Deviasi yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	85% sd. 100%	Baik
3	65 % sd. 85%	Cukup
4	50% s.d 60 %	Kurang
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 3.1 dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) kategori atas capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel.

Kecamatan Petanahan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk memastikan capaian kinerja sampai akhir tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsi

Bahwa proses penyusunan LKjIP Kecamatan Petanahan telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tanggal 9 Januari 2026 dan diikuti oleh 17 orang pegawai.



Gambar 3.1. Foto Pelaksanaan Penyampaian Hasil *Coaching Clinic* Perjanjian Kinerja 2026 dan Reviu LKJIP 2025

Kegiatan tersebut membahas capaian kinerja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 sekaligus penyampaian Perjanjian Kinerja

Tahun 2026. Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat pada link <https://tinyurl.com/LKJIP2025KecPetanahan>.

Berdasarkan pembahasan capaian kinerja tersebut, diperoleh analisis yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan tahun selanjutnya. Berikut adalah hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kinerja Kecamatan Petanahan pada tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan meningkatnya indeks desa membangun dengan indikator persentase desa membangun kategori maju dan mandiri.

Realisasi IKM dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025. Survey tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Di Kecamatan Petanahan, nilai IKM diperoleh dengan metodologi kuantitatif deskriptif pada responden yang sedang menerima layanan di Kecamatan Petanahan. Adapun jenis layanan tersebut terdiri atas:

1. Perekaman KTP-EL
2. Proses Pindah/Datang Antar Kecamatan dan Desa
3. Pemberian Rekomendasi
4. Penerbitan KK
5. Legalisasi Umum
6. Pembuatan Akte Kelahiran
7. Pembuatan Akte Kematian
8. SKCK
9. Numpang Nikah
10. Dispensasi Nikah

Setiap responden diarahkan untuk mengisi kuesioner online pada website <https://skm.kebumenkab.go.id>. Selanjutnya hasil pengisian kuesioner direkap dengan periode triwulanan (triwulan I s.d IV) dan disajikan sebagai nilai IKM triwulanan pada Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Besaran nilai IKM diukur dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik

Sumber: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Nilai IKM diperoleh dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) yang tersedia pada kuesioner, yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Adapun Realisasi IKM tiap triwulan untuk masing-masing unsur di Kecamatan Petanahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

IKM Pertriwulan Tahun 2025 Berdasarkan Unsur Pelayanan

No	Unsur	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Nilai	Mutu layanan	Nilai	Mutu layanan	Nilai	Mutu layanan	Nilai	Mutu layanan
1.	Persyaratan	90.95	A	94.07	A	90.49	A	94.13	A
2.	Prosedur	90.07	A	90.08	A	89.98	A	93.2	A
3.	Waktu Pelayanan	88.42	B	89.2	A	89.46	A	91.37	A
4.	Biaya/Tarif	100	A	100	A	100	A	99.5	A
5.	Produk Layanan	89.02	A	90.19	A	90.13	A	94.76	A
6.	Kompetensi Pelaksana	88.34	A	88.46	A	89.19	A	93.27	A

No	Unsur	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Nilai	Mutu layanan	Nilai	Mutu layanan	Nilai	Mutu layanan	Nilai	Mutu layanan
7.	Perilaku Pelaksana	87.54	B	88.59	A	89.28	A	92.95	A
8.	Sarana dan Prasarana	87.92	B	87.92	B	89.53	A	93.44	A
9.	Penanganan Pengaduan	100	A	99.38	A	100	A	98.89	A
Jumlah Skor		822.88		827.89		828.06		851.5	
Jumlah Responden		95		122		140		93	
Nilai IKM		90,52		91,07		91,09		93,67	

Sumber: website <https://skm.kebumenkab.go.id>

Selanjutnya menghitung nilai IKM tahun 2025 dengan menghitung rata-rata tertimbang menggunakan rumus:

IKM Tahun Per Kecamatan =

$$\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$$

Sehingga diperoleh nilai berikut.

$$\frac{90,52 + 91,07 + 91,09 + 93,67}{4} = \mathbf{91,59} \text{ (Nilai IKM Tahun 2025)}$$

Berdasarkan tabel 3.3 dan perhitungan rumus di atas dapat dilihat bahwa hasil penilaian triwulanan menunjukkan adanya peningkatan dari triwulan I hingga IV. Kategori mutu pelayanan yang sebelumnya masih terdapat kategori B pada triwulan I dan II, sudah ada peningkatan pada triwulan selanjutnya dengan kategori mutu A, serta nilai total sebesar 91,59 termasuk pada kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh Kecamatan Petanahan, khusus pada unsur perilaku pelaksana, dan serta penyediaan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan. Secara keseluruhan, capaian IKM ini tidak hanya menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tetapi juga berdampak pada menurunnya potensi aduan, meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan, serta terciptanya kondisi sosial yang lebih kondusif di wilayah Kecamatan Petanahan.

Perhitungan tersebut di atas adalah nilai capaian kinerja Kecamatan Petanahan tahun 2025 yang juga telah dilaporkan dalam Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I sampai dengan IV tahun 2025.

Realisasi persentase desa membangun kategori maju dan mandiri pada Kecamatan Petanahan diperoleh dengan metode

pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder resmi yang bersumber dari website Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan perekapan berdasarkan nama desa dan kategori desa. Berikut adalah data IDM tahun 2025.

Tabel 3.4

Indeks Desa Membangun Kecamatan Petanahan Tahun 2025

No.	Nama Desa	Skor	Berkembang	Maju	Man Diri
1.	Karangreja	82,05			√
2.	Karanggadung	80.16			√
3.	Tegalretno	82,99			√
4.	Ampelsari	87,87			√
5.	Munggu	84,57			√
6.	Kewangunan	83,31			√
7.	Karangduwur	83,15			√
8.	Petanahan	88,82			√
9.	Kebonsari	70,71		√	
10.	Grogolpenatus	89,92			√
11.	Grogolbeningsari	84,25			√
12.	Jagamertan	84,25			√
13.	Tanjungsari	87,56			√
14.	Sidomulyo	82,68			√
15.	Grujugan	89,45			√
16.	Kritig	87,24			√
17.	Nampudadi	77,64		√	
18.	Tresnorejo	79,84			√
19.	Podourip	83,94			√
20.	Jatimulyo	83,62			√
21.	Banjarwinangun	82,83			√
Total			0	2	19

Sumber data: Kepmendes PDTT Nomor 343 tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.4, jumlah desa di Kecamatan Petanahan sebanyak 21 Desa dengan kategori Maju sebanyak 2 Desa dan Mandiri sebanyak 19 Desa pada tahun 2025, yang artinya semua desa sudah termasuk dalam kategori maju dan mandiri. Selanjutnya Persentase Desa kategori Maju dan Mandiri pada Kecamatan Petanahan dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 &\frac{\text{Jumlah desa di Kecamatan Petanahan dengan Indeks Desa Kategori Maju dan Mandiri}}{\text{Jumlah desa di Kecamatan Petanahan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2 + 19}{21} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Hasil pengukuran pada indikator indeks kepuasan masyarakat dan persentase desa kategori maju dan mandiri kemudian dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perbandingan hasil kinerja dengan target adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	Indeks	91,40	91,59	100,21%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	100	100	100%	Sangat Baik

Sumber data: Survei Kepuasan Masyarakat dan SK Kemendes PDTT tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.5, secara umum capaian kinerja Kecamatan Petanahan menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran pertama, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 91,40 berhasil direalisasikan sebesar 91,59 atau mencapai 100,21 persen dengan kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh kecamatan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut antara lain melalui pelayanan prima, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Selain itu, kecamatan juga secara rutin melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Dampak positif dari capaian ini dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Di sisi lain, aparaturnya kecamatan juga menjadi lebih profesional dan

akuntabel, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah kecamatan.

Pada sasaran kedua, yaitu meningkatnya Indeks Desa Membangun, indikator yang digunakan adalah persentase desa dengan kategori maju dan mandiri. Target sebesar 100 persen berhasil direalisasikan sepenuhnya sebesar 100 persen dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di wilayah Kecamatan Petanahan telah mencapai status desa maju dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan ini meliputi pendampingan kepada pemerintah desa, penguatan kapasitas kelembagaan desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kecamatan juga berperan aktif dalam melakukan koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan desa.

Dampak positif dari capaian ini di antaranya meningkatnya kemandirian desa dalam mengelola potensi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta semakin kuatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, hubungan sinergis antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat semakin baik, sehingga mendorong percepatan pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 ini menunjukkan komitmen kuat Kecamatan Petanahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa, yang pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi seluruh stakeholder, terutama masyarakat pengguna layanan dan pemerintah desa.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingkan dengan capaian dua tahun terakhir. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Petanahan.

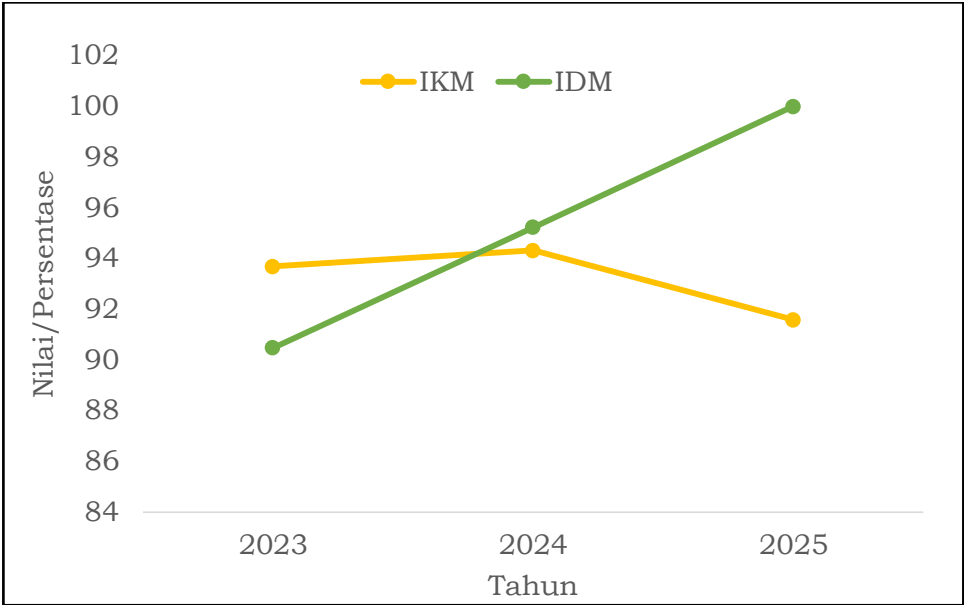
Tabel 3.6

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	88,36	93,69	106,03%	90,38	94,32	104,36%	91,40	91,59	100,21%
2	Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	85,00%	90,48%	106,45%	90,00%	95,23%	105,81%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Sedangkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 sebagai berikut.



Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Berdasarkan tabel 3.6 dan grafik 3.1, dapat dilihat data sebagai berikut.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, pada Tahun 2023 target IKM sebesar 88,36 dengan realisasi mencapai 93,69 atau sebesar 106,03%. Tahun 2024 target meningkat menjadi 90,38 dan realisasi kembali melampaui target yaitu sebesar 94,32 atau mencapai 104,36%. Pada Tahun 2025 target kembali dinaikkan menjadi 91,40 dengan realisasi sebesar 91,59 atau mencapai 100,21%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Petanahan mengalami peningkatan dan mampu dipertahankan secara konsisten. Upaya yang telah dilakukan antara lain peningkatan disiplin aparatur, optimalisasi

pelayanan administrasi masyarakat, peningkatan koordinasi pelayanan antar desa, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta peningkatan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala turut menjadi dasar evaluasi perbaikan pelayanan.

Dampak dari upaya tersebut terlihat pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta terciptanya pelayanan yang lebih cepat, tertib, dan akuntabel.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu penurunan realisasi pada tahun 2025. Hal ini karena beberapa faktor di antaranya belum meratanya kualitas pelayanan pada seluruh jenis layanan, keterbatasan sarana pendukung pelayanan, serta masih adanya kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat maupun aparatur.

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan pelayanan prima, penguatan digitalisasi pelayanan, optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik, serta peningkatan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat agar kualitas pelayanan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Pada sasaran meningkatnya indeks desa membangun Tahun 2023 target sebesar 85,00% dengan realisasi mencapai 90,48% atau sebesar 106,45%. Tahun 2024 target meningkat menjadi 90,00% dan realisasi mencapai 95,23% atau sebesar 105,81%. Selanjutnya pada Tahun 2025 target sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan status pembangunan desa yang cukup signifikan di wilayah Kecamatan Petanahan. Upaya yang telah dilakukan meliputi pembinaan dan pendampingan pemerintah desa, peningkatan koordinasi lintas sektor, fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa, penguatan kelembagaan desa, serta dorongan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dampak positif dari capaian ini adalah meningkatnya kemandirian desa, membaiknya tata kelola pemerintahan desa, meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat desa, serta meningkatnya kemampuan desa dalam mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti adanya ketimpangan kapasitas antar desa, keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, serta perlunya peningkatan inovasi desa untuk mempertahankan status maju dan mandiri.

Selain itu, pencapaian target 100% perlu diikuti dengan upaya menjaga konsistensi kualitas pembangunan desa agar tidak mengalami penurunan status pada tahun berikutnya. Perbaikan yang perlu dilakukan antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, penguatan monitoring dan evaluasi perkembangan desa, peningkatan inovasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan stakeholder terkait dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel 3.7
Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Capaian 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	91,59	92,42	99,10%
2	Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	100	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat data sebagai berikut.

Pada indikator IKM Tahun 2025 realisasi capaian sebesar 91,59, sedangkan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 92,42. Dengan demikian tingkat kemajuan mencapai 99,10%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Petanahan telah berada pada kategori sangat baik dan hampir memenuhi target akhir Renstra. Upaya yang telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas pelayanan administrasi, penguatan disiplin dan responsivitas aparatur, optimalisasi koordinasi pelayanan dengan pemerintah desa, pelaksanaan evaluasi pelayanan melalui survei kepuasan masyarakat, serta penyederhanaan prosedur pelayanan kepada masyarakat.

Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pelayanan publik akan mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat citra positif pemerintah daerah di tingkat masyarakat.

Meskipun tingkat kemajuan sudah sangat tinggi, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam peningkatan inovasi pelayanan berbasis digital, pemerataan kualitas pelayanan pada seluruh jenis layanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Perbaikan yang perlu dilakukan ke depan meliputi peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan pelayanan prima, optimalisasi digitalisasi pelayanan, peningkatan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

Pada indikator IDM, tahun 2025 indikator telah mencapai 100%, sesuai dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 100%, sehingga tingkat kemajuan mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa di wilayah Kecamatan Petanahan telah berhasil mencapai kategori maju dan mandiri sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain pembinaan dan pendampingan pemerintah desa secara berkelanjutan,

fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dorongan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam jangka panjang, capaian ini akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa, meningkatkan kemampuan desa dalam menghadapi tantangan pembangunan, serta mendukung terciptanya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Walaupun target akhir Renstra telah tercapai, upaya perbaikan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain peningkatan inovasi desa, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, optimalisasi monitoring dan evaluasi perkembangan desa, serta peningkatan sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan stakeholder lainnya agar status desa maju dan mandiri dapat dipertahankan secara konsisten.

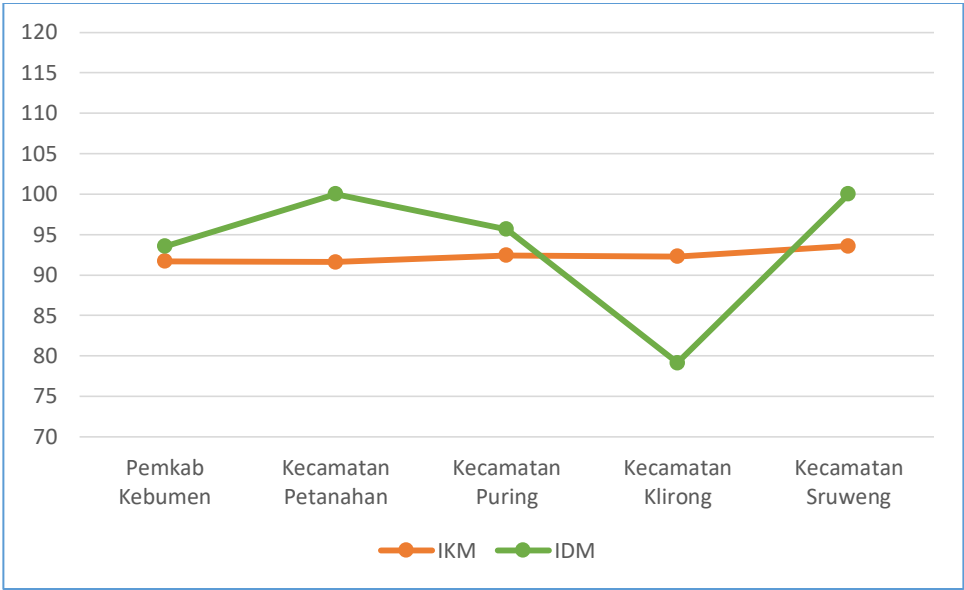
3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten dan Kecamatan Lain

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Petanahan tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten dan Kecamatan Sekitar.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten dan Kecamatan Lain Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Pemkab Kebumen	Kecamatan Petanahan	Kecamatan Puring	Kecamatan Klirong	Kecamatan Sruweng
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	91,71	91,59	92,42	92,31	93,57
2	Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	93,54	100	95,65	79,16	100

Sumber: Data diolah, 2026



Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Standar Kabupaten dan Kecamatan Lain

Berdasarkan data tabel 3.8 dan grafik 3.2 di atas, dapat dilihat data sebagai berikut.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 Kecamatan Petanahan memperoleh nilai sebesar 91,59. Capaian ini sedikit berada di bawah standar Kabupaten Kebumen sebesar 91,71 dan juga masih di bawah Kecamatan Puring sebesar 92,42, Kecamatan Klirong sebesar 92,31, serta Kecamatan Sruweng sebesar 93,57. Artinya, jika dibandingkan dengan kecamatan lain, capaian IKM Kecamatan Petanahan masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Perbedaan nilai dengan kecamatan lain menunjukkan masih adanya ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan agar lebih efektif dan responsif. Perbaikan yang perlu dilakukan ke depan meliputi pengembangan pelayanan berbasis digital, peningkatan pelayanan prima, optimalisasi tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan perbaikan tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Petanahan dapat melampaui standar kabupaten dan sejajar dengan kecamatan yang memiliki capaian tertinggi.

Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada meningkatnya partisipasi

masyarakat, terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pada Indikator Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Tahun 2025 Kecamatan Petanahan mencapai nilai 100%, lebih tinggi dibanding standar Kabupaten Kebumen sebesar 93,54%. Capaian ini juga setara dengan Kecamatan Sruweng sebesar 100%, serta lebih tinggi dibanding Kecamatan Puring sebesar 95,65% dan Kecamatan Klirong sebesar 79,16%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Petanahan telah berhasil mencapai kategori maju dan mandiri. Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti pembinaan dan pendampingan pemerintah desa secara berkelanjutan, fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dorongan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dampak positif dari capaian tersebut terlihat pada meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, meningkatnya kemampuan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatnya kemandirian desa dalam mendukung pembangunan wilayah. Selain itu, status desa maju dan mandiri turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi desa. Walaupun capaian telah mencapai 100%, upaya perbaikan tetap diperlukan agar kualitas pembangunan desa dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain peningkatan inovasi desa, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan potensi lokal, serta peningkatan monitoring dan evaluasi perkembangan desa.

Dalam jangka panjang, keberhasilan seluruh desa mencapai status maju dan mandiri akan berdampak pada pemerataan pembangunan wilayah, meningkatnya daya saing desa, serta terciptanya pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan berbasis potensi masyarakat lokal.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Secara umum, kinerja pelayanan publik di Kecamatan Petanahan mengalami peningkatan dan mampu melampaui target renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Petanahan Tahun 2025.

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi atas Indeks Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	91,40	91,59	100,21%	Kecamatan Petanahan telah mencapai target kinerja dengan telah dilakukannya berbagai upaya, yaitu 1. Menerapkan pelayanan prima, 2. Standarisasi pelayanan melalui penerapan SOP, 3. Mengarahkan masyarakat dalam penggunaan Identitas Kependudukan Digital, 4. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik terkait pelayanan dengan lintas sektor. 5. Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat
2	Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	100	100%	Kecamatan Petanahan telah mencapai target kinerja dengan telah dilakukannya berbagai upaya, yaitu 1. Pendampingan kepada pemerintah desa, 2. Penguatan kapasitas kelembagaan desa, 3. Berperan aktif dalam melakukan koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan desa. 4. Adanya Inovasi “Gemas” (Gerakan Mendampingi Penyusunan APBDes Serentak.

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 3.9, pada Tahun 2025 Kecamatan Petanahan berhasil mencapai target kinerja, melalui beberapa upaya yang telah dilakukan di atas. Ke depan, perlu dilakukan peningkatan inovasi dan digitalisasi pelayanan serta penguatan kapasitas aparatur guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada sasaran meningkatnya Indeks Desa Membangun, ke depan, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan inovasi desa, dan optimalisasi pembinaan agar capaian dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Efisiensi Anggaran

Berdasarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Petanahan Tahun 2025, penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinilai telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini tercermin dari capaian IKM sebesar 91,59, yang mendekati target akhir Renstra. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pelayanan telah diarahkan secara optimal pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari sisi efisiensi, capaian kinerja yang baik diperoleh tanpa adanya kebutuhan tambahan sumber daya yang besar, sehingga menunjukkan bahwa proses pelayanan telah berjalan dengan tata kelola yang semakin tertib, sederhana, dan terstandar. Sementara itu, dari sisi efektivitas, program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang sejalan dengan sasaran yang ditetapkan, sebagaimana tercermin dari peningkatan kepuasan masyarakat secara bertahap pada setiap triwulan. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pada Kecamatan Petanahan telah memenuhi prinsip *value for money* sebagaimana diamanatkan dalam PMK terbaru, yaitu menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal dengan biaya dan sumber daya yang terkendali. Ke depan, penguatan inovasi pelayanan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas capaian kinerja tanpa menambah beban sumber daya secara signifikan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran

keluaran dengan capaian keluaran. Adapun rumus pengukuran efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Tabel di bawah ini adalah gambaran analisis efisiensi atas pencapaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran Kecamatan Petanahan.

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	91,40	91,59	100,21%	Rp2.581.372.700,00	Rp2.283.785.365,00	88,47%	11,74%
2	Meningkatnya Indeks Desa Membangun	100	100	100%				

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 11,76%. Hal ini mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat guna.

2. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia

Analisis sumber daya manusia (SDM) disusun untuk menilai kecukupan, kompetensi, serta efektivitas pemanfaatan aparatur dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Evaluasi ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa pengelolaan SDM telah

selaras dengan sasaran strategis dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Berikut ini adalah tabel Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya.

Tabel 3.11
Bezeting ASN Kecamatan Petanahan
Per 1 Januari 2026

NO	JABATAN	BEZE TING	KEB UTU HAN	+/-	NAMA PEGAWAI/PEJABAT
1	CAMAT	1	1	0	ARIS YUNANTO, SIP,M.Si
2	SEKRETARIS KECAMATAN	1	1	0	BACHTIAR ACHMAD,S.T,M.Ec.Dev
3	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	1	0	UCHI, MARDIASIH, S.E,MM
3.1	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	1	1	0	FITA ISHFAH AINI, S.E
3.2	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	1	1	0	HARYANTO, S.Pd
3.3	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1	-1	
3.4	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1	0	LISEM, A.KS
4	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	1	-1	Plt
4.1	JF ARSIPARIS MAHIR	0	1	-1	
4.2	JF ARSIPARIS TERAMPIL	1	1	0	NURHIDAYATI, A.Md
4.3	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	0	1	-1	
4.4	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2	-2	
4.5	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1	1	NASTANGINAH JUMADI, S.E
4.6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	4	-4	
5	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	1	1	0	WRIN ANDOKO
5.1	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	0	1	-1	
5.2	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1	0	SRI HARTATI, S.Pd
5.3	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1	-1	
6	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	1	1	0	BUDIYONO, S.Pd, M.Pd
6.1	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	0	1	-1	
6.2	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	1	-1	
6.3	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1	0	PAING
7	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0	1	-1	Plt
7.1	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI	1	1	0	AHMAD IRFANGI, S.A.P
7.2	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	0	1	-1	
7.3	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1	-1	
7.4	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1	0	SARINGAH
8	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1	0	SUNARTI, S.Sos
8.1	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	0	1	-1	
8.2	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2	-1	DWI LESTARI
8.3	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1	0	AKHMAD KHANIFUDIN, S.AP
	JUMLAH	18	36	-18	

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Petanahan, 2026

Berdasarkan data tabel 3.11 bezetting dan kebutuhan pegawai, Kecamatan Petanahan memiliki jumlah pegawai sebanyak 18 orang dari total kebutuhan ideal 36 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 18 pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, pemenuhan sumber daya manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara optimal.

Pada level struktural, sebagian besar jabatan pimpinan utama telah terisi sesuai kebutuhan, seperti Camat, Sekretaris Kecamatan, dan beberapa Kepala Seksi. Namun demikian, masih terdapat jabatan struktural yang belum terisi definitif dan dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt), antara lain Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, yang berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan.

Pada jabatan fungsional dan pelaksana, masih terdapat kekurangan yang cukup signifikan, khususnya pada jabatan Pengolah Data dan Informasi, Penelaah Teknis Kebijakan, Operator/Pengelola Layanan Operasional, serta Pengadministrasi Perkantoran di beberapa unit kerja. Kekurangan tersebut berdampak pada meningkatnya beban kerja pegawai yang ada serta perlunya pelaksanaan tugas secara rangkap jabatan. Meskipun demikian, terdapat pula kelebihan pegawai pada jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang dapat dioptimalkan melalui penataan dan distribusi tugas internal.

Secara keseluruhan, keterbatasan jumlah SDM telah diantisipasi melalui optimalisasi peran pegawai yang ada, penugasan lintas fungsi, serta peningkatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik sehingga penggunaan SDM tetap efisien. Ke depan, diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap, penataan ulang distribusi pegawai, serta penguatan kompetensi aparatur agar pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Kecamatan Petanahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta berkelanjutan.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Petanahan 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat. Berikut gambaran capaian program dan kegiatan.

Tabel 3.12

Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	100,21%				Menunjang
1.1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	Menunjang
A				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %	Menunjang
B				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00 %	Menunjang
C				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00 %	Menunjang
D				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	100.00 %	Menunjang
E				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100.00 %	Menunjang
F				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	Menunjang
1.2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100.21 %	Menunjang
A				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang	100.00 %	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					dilimpahkan kepada camat		
1.3				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 %	Menunjang
A				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100.00 %	Menunjang
1.4				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100.00 %	Menunjang
A				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	96.15%	Menunjang

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Petanahan, 2026

Pada tabel 3.12, dapat dijelaskakn bahwa secara umum, seluruh program mendukung tercapainya kinerja Kecamatan Petanahan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, jika dikaitkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri atas dua sasaran, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan dan Meningkatnya Indeks Desa Membangun, maka Program yang paling mendukung yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini mendukung tercapainya target IKU yaitu pada indikator Kepuasan masyarakat karena di dalamnya fokus pada kegiatan yang mendukung perbaikan pelayanan di Kecamatan Petanahan, seperti Sosialisasi Adminduk, Forum Konsultasi Publik tentang pelayanan.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini mendukung tercapainya target IKU pada sarasan kedua yaitu meningkatnya Indeks desa Membangun. Karena di dalam program ini fokus pada Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Ada peran aktif dari kecamatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan Petanahan di dukung oleh pagu anggaran yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025.

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Kecamatan Petanahan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2025		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.396.887.200	2.107.057.465	87,91%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.228.300	9.111.100	98,73%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.218.247.400	1.931.980.484	87,09%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.394.900	41.662.000	98,27%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.750.000	35.194.000	98,44%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.016.600	30.142.584	94,15%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.250.000	58.967.297	99,52%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.314.500	42.283.850	99,93%
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	42.314.500	42.283.850	99,93%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.002.800	18.999.600	99,98%
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.002.800	18.999.600	99,98%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	123.168.200	115.444.450	93,73%
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.168.200	115.444.450	93,73%
	TOTAL PAGU PERUBAHAN	2.581.372.700	2.283.785.365	88,47%

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Petanahan, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi sebesar 88,47%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang baik, namun masih diperlukan perbaikan agar capaian semakin meningkat. Capaian dari total Sembilan kegiatan, ada delapan kegiatan yang mencapai realisasi di atas 90%, sedangkan terdapat satu kegiatan di bawah 90% pada sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan. Hal ini dikarenakan ada jabatan kosong yang belum terisi hingga akhir tahun sehingga penyerapan anggaran gaji tidak maksimal. Selanjutnya dasar realisasi ini dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana anggaran tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara umum capaian Kecamatan petanahan telah mencapai target yang telah direncanakan, baik pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, maupun meningkatnya indeks desa membangun. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan memberikan hasil yang baik. Namun, beberapa kendala masih perlu menjadi perhatian mengingat pada beberapa poin perbandingan kinerja masih menunjukkan nilai dengan trend menurun dari tahun 2024 ke 2025 pada sasaran pertama. Begitu juga dengan perbandingan dengan kecamatan lain, Petanahan masih berada di posisi bawah. Pada sasaran kedua, Kecamatan Petanahan telah mencapai 100% target yang ditetapkan.

Dari sisi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, Kecamatan Petanahan mampu mencapai kinerja yang optimal dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 88,47 persen dan tingkat efisiensi sebesar 11,76 persen, yang mengindikasikan pengelolaan anggaran yang hemat dan tepat guna tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, termasuk kekurangan jumlah pegawai dan beberapa jabatan yang belum terisi secara definitif, kondisi tersebut dapat diantisipasi melalui optimalisasi peran pegawai, penugasan lintas fungsi, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Petanahan telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Ke depan, upaya peningkatan kinerja akan terus diarahkan pada penguatan inovasi pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap, serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan guna menjaga keberlanjutan kinerja dan mencapai target akhir Renstra secara optimal.

4.2 Permasalahan/Kendala

Pencapaian kinerja Kecamatan Petanahan secara umum sudah baik dan sesuai dengan target, tetapi masih mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, khususnya pada fasilitas kursi pada ruang tunggu dan keterbatasan ruang penyimpanan arsip pelayanan, turut memengaruhi kenyamanan masyarakat serta efektivitas proses administrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas fisik yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan.

2. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah ketergantungan pelayanan terhadap jaringan internet, dimana gangguan konektivitas masih sering terjadi dan berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan berbasis digital. Hal ini menyebabkan proses pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal dan berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat.

3. Belum meratanya pemahaman masyarakat pada kemudahan proses layanan.

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan di Kecamatan rumit, sehingga ada beberapa masyarakat yang masih memanfaatkan pelayanan di kabupaten. Selain itu, beberapa masyarakat juga belum memahami apa saja jenis layanan yang tersedia.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi perlu untuk diantisipasi untuk mengoptimalkan pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala yang telah disebutkan dalam laporan ini, berikut beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan efektivitas administrasi pelayanan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas pelayanan, seperti penambahan AC, penataan ruang tunggu, serta penyediaan sarana pendukung lainnya yang ramah masyarakat.
 - b. Menata kembali ruang arsip khusus yang aman, tertata, guna mendukung pengelolaan dokumen pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Melakukan penataan ulang ruang pelayanan agar alur pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan nyaman bagi masyarakat.
 - d. Mengintegrasikan perencanaan sarana dan prasarana ke dalam perencanaan anggaran tahunan agar pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Meminimalkan dampak gangguan jaringan internet terhadap pelayanan, dengan cara:
- a. Berkoordinasi dengan penyedia layanan internet dan OPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas jaringan di lingkungan kecamatan.
 - b. Mengembangkan mekanisme pelayanan manual atau semi-digital sebagai solusi sementara apabila sistem online mengalami kendala.
 - c. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik, sehingga pelayanan digital dapat berjalan lebih optimal dan adaptif.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kemudahan proses layanan di Kecamatan dengan strategi yang berfokus pada peningkatan literasi layanan, perluasan informasi, serta penguatan kedekatan pelayanan dengan masyarakat.
- a. Melakukan intensifikasi sosialisasi jenis dan alur layanan kecamatan melalui berbagai media, baik tatap muka (Forum Konsultasi Publik) maupun media digital seperti website, media sosial, dan infografis layanan yang mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui secara jelas jenis layanan yang tersedia di kecamatan.
 - b. Penyediaan alur layanan yang sederhana dan menyajikan SOP layanan serta informasi jenis layanan pada papan mudah

terlihat oleh masyarakat lengkap beserta persyaratan yang diperlukan.

- c. Dilakukan sinergi dengan pemerintah desa dan kader desa sebagai perpanjangan tangan informasi layanan kecamatan. Aparatur desa dapat berperan aktif menyampaikan informasi layanan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Petanahan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan kinerja, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun selanjutnya.

Kebumen, 28 Januari 2026


Kecamatan Petanahan
Aris Yunarto, S.IP., M.Si.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 196909271989111001

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN
Jl. Sokka Petanahan KM 13 Petanahan Telp. (0287)6655369
Email : kec.petanahan@kebumenkab.go.id
Website : kec-petanahan.kebumen.go.id Kode Pos : 54382

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aris Yunanto, S.IP.,M.Si.
Jabatan : Camat Petanahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Aris Yunanto, S.IP.,M.Si.
NIP. 196909271989111001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00	85,00				85,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40	91,40				91,40
3	Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	100	100				100

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.475.867.000,00	Rp2.396.887.200,00	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp1.138.449.000,00	Rp42.314.500,00	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp21.002.000,00	Rp19.002.800,00	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp141.267.000,00	Rp123.168.200,00	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Camat Petanahan
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Aris Yunanto, S.IP., M.Si.
NIP. 196909271989111001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PETANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.396.887.200		2.396.887.200	100,00	100,00	1.892.877.471	214.179.994	2.107.057.465	87,91	100,00	12,09	0,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.228.300		9.228.300	100,00	100,00	8.469.300	641.800	9.111.100	98,73	100,00	1,27	0,00		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.628.300	APBD (DAU Earmarked)	5.628.300	100,00	100,00	5.370.300	221.800	5.592.100	99,36	100,00	0,64	0,00		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	APBD (DAU Earmarked)	3.600.000	100,00	100,00	3.099.000	420.000	3.519.000	97,75	100,00	2,25	0,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.218.247.400		2.218.247.400	100,00	100,00	1.724.693.339	207.287.145	1.931.980.484	87,09	100,00	12,91	0,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.204.980.000	APBD (DAU Earmarked)	2.204.980.000	100,00	100,00	1.714.740.019	205.016.151	1.919.756.170	87,06	100,00	12,94	0,00	adanya kekosongan pada kasubag umpeg da kasi PM	-
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.267.400	APBD (DAU Earmarked)	13.267.400	100,00	100,00	9.953.320	2.270.994	12.224.314	92,14	100,00	7,86	0,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.394.900		42.394.900	100,00	100,00	40.297.100	1.364.900	41.662.000	98,27	100,00	1,73	0,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	APBD (DAU Earmarked)	2.000.000	100,00	100,00	1.996.500		1.996.500	99,83	100,00	0,17	0,00		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.284.900	APBD (DAU Earmarked)	13.284.900	100,00	100,00	12.800.000	480.000	13.280.000	99,96	100,00	0,04	0,00		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.200.000	APBD (DAU Earmarked)	7.200.000	100,00	100,00	6.799.600	400.400	7.200.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	APBD (DAU Earmarked)	2.000.000	100,00	100,00	1.975.000		1.975.000	98,75	100,00	1,25	0,00		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.600.000	APBD (DAU Earmarked)	12.600.000	100,00	100,00	12.549.400		12.549.400	99,60	100,00	0,40	0,00		
JUMLAH		2.581.372.700		2.581.372.700	100,00	100,00	2.054.090.721	229.694.644	2.283.785.365	88,47	99,80	11,53	0,20		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.780.000	APBD (DAU Earmarked)	3.780.000	100,00	100,00	2.647.000	484.500	3.131.500	82,84	100,00	17,16	0,00	anggaran BBM belum terserap maksimal, kegiatan sudah terlaksana semua	dilakukan perhitungan sebagai pertimbangan anggaran tahun berikutnya
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.530.000	APBD (DAU Earmarked)	1.530.000	100,00	100,00	1.529.600		1.529.600	99,97	100,00	0,03	0,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.750.000		35.750.000	100,00	100,00	35.194.000		35.194.000	98,44	100,00	1,56	0,00		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	750.000	APBD (DAU Earmarked)	750.000	100,00	100,00	725.000		725.000	96,67	100,00	3,33	0,00		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	APBD (DAU Earmarked)	15.000.000	100,00	100,00	14.590.000		14.590.000	97,27	100,00	2,73	0,00		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	APBD (DAU Earmarked)	20.000.000	100,00	100,00	19.879.000		19.879.000	99,40	100,00	0,60	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.016.600		32.016.600	100,00	100,00	28.477.935	1.664.649	30.142.584	94,15	100,00	5,85	0,00		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	APBD (DAU Earmarked)	400.000	100,00	100,00	400.000		400.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000	APBD (DAU Earmarked)	27.000.000	100,00	100,00	23.469.435	1.664.649	25.134.084	93,09	100,00	6,91	0,00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.616.600	APBD (DAU Earmarked)	4.616.600	100,00	100,00	4.608.500		4.608.500	99,82	100,00	0,18	0,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.250.000		59.250.000	100,00	100,00	55.745.797	3.221.500	58.967.297	99,52	100,00	0,48	0,00		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.000.000	APBD (DAU Earmarked)	46.000.000	100,00	100,00	42.612.797	3.221.500	45.834.297	99,64	100,00	0,36	0,00		
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.250.000	APBD (DAU Earmarked)	1.250.000	100,00	100,00	1.238.000		1.238.000	99,04	100,00	0,96	0,00		
JUMLAH		2.581.372.700		2.581.372.700	100,00	100,00	2.054.090.721	229.694.644	2.283.785.365	88,47	99,80	11,53	0,20		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
		(Rp)	(%)				(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	APBD (DAU Earmarked)	2.000.000	100,00	100,00	2.000.000		2.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	APBD (DAU Earmarked)	10.000.000	100,00	100,00	9.895.000		9.895.000	98,95	100,00	1,05	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.314.500		42.314.500	100,00	100,00	37.646.350	4.637.500	42.283.850	99,93	100,00	0,07	0,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	42.314.500		42.314.500	100,00	100,00	37.646.350	4.637.500	42.283.850	99,93	100,00	0,07	0,00		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	37.314.500	APBD (DAU Earmarked)	37.314.500	100,00	100,00	32.646.850	4.637.500	37.284.350	99,92	100,00	0,08	0,00		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	APBD (DAU Earmarked)	5.000.000	100,00	100,00	4.999.500		4.999.500	99,99	100,00	0,01	0,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.002.800		19.002.800	100,00	100,00	18.999.600		18.999.600	99,98	100,00	0,02	0,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.002.800		19.002.800	100,00	100,00	18.999.600		18.999.600	99,98	100,00	0,02	0,00		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.002.800	APBD (DAU Earmarked)	19.002.800	100,00	100,00	18.999.600		18.999.600	99,98	100,00	0,02	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	123.168.200		123.168.200	100,00	100,00	104.567.300	10.877.150	115.444.450	93,73	95,78	6,27	4,22		
JUMLAH		2.581.372.700		2.581.372.700	100,00	100,00	2.054.090.721	229.694.644	2.283.785.365	88,47	99,80	11,53	0,20		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.168.200		123.168.200	100,00	100,00	104.567.300	10.877.150	115.444.450	93,73	95,78	6,27	4,22		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.455.800	APBD (DAU Earmarked)	28.455.800	100,00	100,00	24.613.000	3.392.000	28.005.000	98,42	100,00	1,58	0,00		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.200.000	APBD (DAU Earmarked)	5.200.000	100,00	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00	belum ada aturan terkait PAW Kades	menunggu surat perintah dari kabupaten
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.680.000	APBD (DAU Earmarked)	16.680.000	100,00	100,00	14.702.400	1.160.800	15.863.200	95,10	100,00	4,90	0,00		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.060.000	APBD (DAU Earmarked)	9.060.000	100,00	100,00	8.363.000	660.000	9.023.000	99,59	100,00	0,41	0,00		
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.769.000	APBD (DAU Earmarked)	21.769.000	100,00	100,00	19.964.800	1.225.500	21.190.300	97,34	100,00	2,66	0,00		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	33.313.600	APBD (DAU Earmarked)	33.313.600	100,00	100,00	28.660.100	4.213.250	32.873.350	98,68	100,00	1,32	0,00		
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.689.800	APBD (DAU Earmarked)	8.689.800	100,00	100,00	8.264.000	225.600	8.489.600	97,70	100,00	2,30	0,00		
JUMLAH		2.581.372.700		2.581.372.700	100,00	100,00	2.054.090.721	229.694.644	2.283.785.365	88,47	99,80	11,53	0,20		

Kebumen, -
Camat Petanahan

ARIS YUNANTO, S.IP,M.Si.
NIP. 196909271989111001